

# Pengaruh Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Rizal Fitri Abdillah<sup>1</sup> Agus Salim<sup>2</sup> Hari Purnomo<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang  
rizalabdillah35@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholder nya untuk menciptakan akuntabilitas kinerja. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang - undang No. 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sampel dalam penelitian ini adalah instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan menggunakan pengujian rasio efisiensi Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata Kunci : Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan.**

## PENDAHULUAN

Isu tentang kinerja instansi Pemerintahan dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut Pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extra ordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat Pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, Pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Riantiaro. 2011:99). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik *good governance* berkenaan dengan (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; dan (8) *strategy vision* Mardiasmo (2002:76).

Banyak sekali kasus penyelewengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak sesuai dengan hukum bahkan ada juga Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan dan menyedihkan. Jika Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) tidak membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka bagaimana masyarakat bisa menilai keberhasilan kinerja dari Pemerintah. Telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku masih banyak terjadi di Instansi Pemerintahan, salah satunya terjadi pada instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

## **METODE PENELITIAN**

Sugiyono (2013:117) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Kriteria penarikan sampel diambil dari laporan realisasi anggaran setelah Penerapan Anggaran. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sampel yang diambil mewakili dan diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel tersebut harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*, sehingga dalam penelitian ini hanya sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP).

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, dalam penelitian ini yaitu variabel X (anggaran berbasis kinerja) dan variabel Y (akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah). Penelitian ini merupakan penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen terhadap kinerja aparatur Pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Terdapat Pengaruh Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang di buktikan dengan Analisis rasio secara umum menunjukkan bahwa anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja yang dapat dikatakan baik. Ditunjukkan dengan sebagian besar bidang yang diteliti mengalami selisih lebih atau selisih yang diharapkan dan hanya bidang seksi promosi dan kerjasama dan kepala seksi pengelola destinasi pariwisata yang mengalami perbedaan yang sangat signifikan yaitu sebesar 92%. Dikuatkan juga dengan target realisasi anggaran pendapatata dari tahun 2015-2017 memiliki angka rata-rata sebesar 98%. Jika dilihat dari berbagai bidang yang diteliti, maka persentase paling tinggi terjadi pada kepala seksi jasa usaha yaitu mencapai

angka 100% dengan total pendapatan dan pengeluaran yang sama yaitu mencapai Rp.623.445.000, kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif 100% dengan total pendapatan dan pengeluaran yang sama yaitu mencapai Rp.446.500.000, subag umum kepegawaian 100% dengan total pendapatan dan pengeluaran yang sama yaitu mencapai Rp.7.041.928.000, subag sungram 100% dengan total pendapatan dan pengeluaran yang sama yaitu mencapai Rp.33.592.000 sedang persentase paling rendah terjadi untuk kepala promosi dan hasil kerjasama yaitu 92% dengan total pagu anggaran dan realisasi yang berbeda yaitu total program anggaran mencapai Rp. 6.583.518.000 sedangkan total realisasi anggaran mencapai Rp.5.977.508.000, Kepala seksi pengolahan destinasi pariwisata 92% dengan total pagu anggaran dan realisasi yang berbeda yaitu total program anggaran mencapai Rp.11.831.322.000 sedangkan total realisasi anggaran mencapai Rp.10.772.252.000. Hasil Penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:137) yaitu Pemerintah Kabupaten dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Pemerintah pusat dialokasikan dalam bentuk dana inpres (regional) maupun dana DIP (sektoral), maka saat ini sebagian besar sudah dalam bentuk bantuan spesifik yang langsung diterima dan dikelola oleh daerah Menurut Mardiasmo (2002:105) "Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik".Selanjutnya Mardiasmo (2002:132) menyatakan "Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output)". Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan Sumber Daya dan Dana yang serendah-rendahnya (spending well relevansi hasil dengan penelitian terdahulu).

## **KESIMPULAN**

Rasio Efisiensi Belanja dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Pada rasio efisiensi belanja daerah dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Lumajang pada masa penerapan anggaran 2015, 2016 dan 2017 telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi konsisten diatas 90% persen selama 3 tahun berturut-turut. sehingga dapat dikatakan bahwa Kinerja pada instansi pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan sangat terpengaruh pada anggaran yang ada dan sesuai dengan sasaran dan target program yang akan direncanakan dan dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astria, febrina verasvera. 2016 Pengaruh berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur Pemerintahan daerah. jurnal manajemen Volume.15 no.2.
- Auditya, Lucy dan Husaini, Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh akuntabilitas dantransparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah daerah.Jurnal Fairness Volume 3, Nomer 1, 2013 : 21-41. ISSN, 2303-0348.

- Avonita, Venni. 2013. Pengaruh Implementasi anggaran berbasis kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi Pemerintahan daerah. fakultas ekonomi widyatama.
- Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana.
- LAN, BPKP. 2000. Pengukuran kinerja instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- Mardiasmo. 2004, Akuntansi Sektor Publik, Edisi II, penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Hal 1-17.